

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA TULANG BAWANG NO. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb  
TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN  
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**WIRA PUTRI**

**NPM: 1721010089**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA TULANG BAWANG NO. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb  
TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN  
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**Wira Putri**

**NPM: 1721010089**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**Pembimbing I : Marwin, S.H, M.H  
Pembimbing II : Frenki, S.E.I., M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Putri  
NIM : 1721010089  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-laki” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2021

Penulis,



Wira Putri

1721010089





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG NO. 0262/PDT.G/2019/PA.TLB  
TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI  
INGIN MEMPUYAI ANAK LAKI-LAKI**

**Nama Mahasiswa : Wira Putri  
NPM : 1721010089  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Marwin, S.H., M.H.  
NIP. 197501292000031001**

**Pembimbing II**

**Frenki, S.E., M.Si  
NIP. 198003152009011017**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**

**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.  
NIP. 1974090202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NO. 0262/PDT.G/2019/PA.TLB TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI"** disusun oleh, **Wira Putri, NPM. 1721010089**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munakaasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 16 Juni 2021**.

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**Penguji II : Marwin, S.H, M.H.**

**Penguji III : Frenki, S.E.I., M.Si.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**





## ABSTRAK

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dengan waktu yang bersamaan. Dalam putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang perkara No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk izin poligami terhadap termohon dengan salah satu alasan karena suami (pemohon) ingin mempunyai anak laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim Pengadilan Agama pada perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hakim menjadi lemah karena suami ingin mempunyai anak laki-laki tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 3.

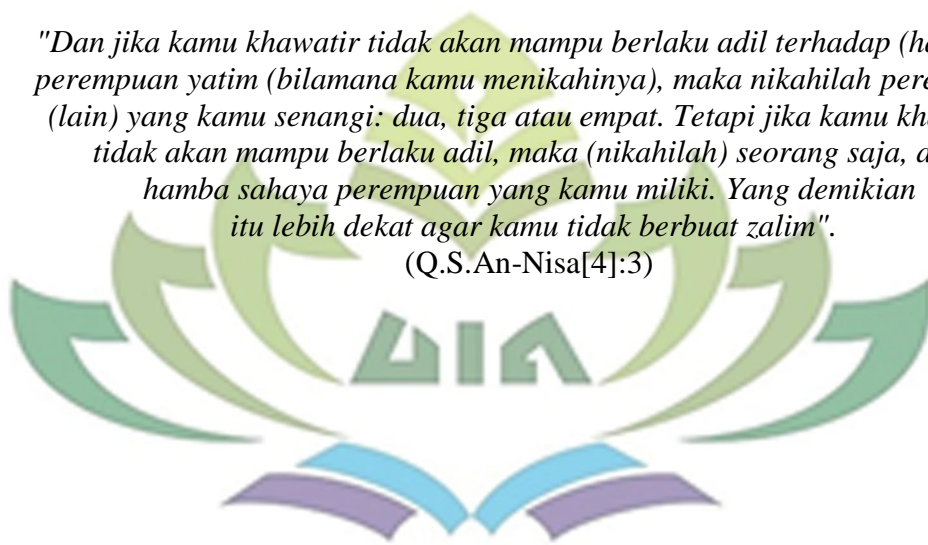
**Kata Kunci:** Hukum Islam, Poligami, Putusan.

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".*

(Q.S.An-Nisa[4]:3)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Abahku tercinta (Zakaria) dan Ibuku tersayang (Rusita Dewi), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaganya kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Redi Frenki, Hilmi Joni dan ayukku Yesi Konita yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan dan selalu memberikan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

**Wira Putri** dilahirkan di Rajabasa, pada tanggal 01 Oktober 1999, anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Zakaria, dan Ibu Rusita Dewi. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 4 Natar Lampung Selatan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, Mei 2021

Wira Putri

NPM: 1721010089



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG NO. 0262/Pdt.G/PA.Tib TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Marwin, S.H, M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Frenki, S.E.I., M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



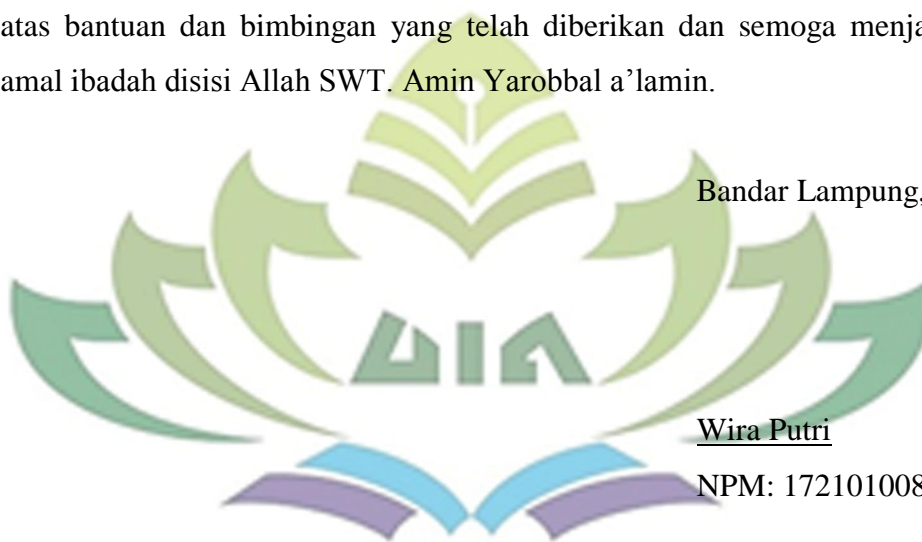
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku Siti Nuraini, Firdawati Heryadi Putri, Via Helen Amelia dan Abel Yurike yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwwal Syakhshiyah*) angkatan 2017, khususnya kelas A yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, Mei 2021

Wira Putri

NPM: 1721010089



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Poligami .....	17
1. Pengertian Poligami .....	17
2. Dasar Hukum Poligami .....	19
3. Hikmah Poligami .....	26
4. Alasan Kebolehan Poligami .....	30
5. Syarat Poligami .....	31



6. Prosedur Poligami .....	33
B. Pandangan Ulama Terhadap Poligami .....	38
C. Kedudukan Anak Laki-Laki .....	41
1. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Islam .....	41
2. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Adat Lampung .....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Duduk Perkara .....	47
B. Pertimbangan Hukum .....	56
C. Amar Putusan .....	64

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki .....	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan dalam suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaannya.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang

---

<sup>1</sup>Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 32.

<sup>2</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

<sup>3</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 146.



yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam<sup>4</sup>.

Perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb adalah perkara tingkat pertama antara Soleman alias Sulaiman bin Agustam sebagai Pemohon melawan Zubaidah alias Subaidah binti Penutup sebagai Termohon yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 25 juli 2019 oleh H. Soleh, Lc.,MA. Sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.<sup>5</sup>

Poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama serta analisis hukum Islam terhadap izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) adalah membina keluarga (rumah

---

<sup>4</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003),3.

<sup>5</sup> Putusan Nomor.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb, 17.

<sup>6</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 693.

tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Menurut pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Qur'an yaitu , mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud di sini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal dan biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, daan melupakan unsur keadilan di dalamnya.<sup>8</sup>

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu*

<sup>7</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup>Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 No.2 (2018): 4, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.v5i2.7108>.



*khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (Q.S.An-Nisa[4]:3)*

Persoalan poligami hingga saat ini masih menjadi kajian yang menarik. Tidak hanya yang berkaitan dengan penafsiran keagamaan, namun juga hak dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pelaku perkawinan poligami. Meskipun poligami terlegislasi dan mempunyai payung yuridis, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku perkawinan poligami yang tidak berkeadilan. Perkawinan poligami tidak hanya berdampak dalam keluarga baik bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya, namun juga dampak sosial bagi keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Karena itu, formulasi poligami yang berkeadilan harus terus digali dan ditransformasikan secara pasif sehingga perkawinan poligami, tidak menjadikan istri dan anak-anak menjadi korban, namun mengangkat harkat dan martabat mereka.<sup>9</sup>

Berdasarkan UUP, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Pada dasarnya poligami dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Walaupun hal tersebut dikehendaki oleh yang bersangkutan, namun poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan di putuskan oleh Pengadilan.

Pemohon atau seorang suami yang ingin poligami sudah diatur dalam UUP Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan dapat memberi izin kepada

---

<sup>9</sup>Rudi Nurudin Ambary, "Perkawinan Poligami yang Berkeadilan," *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 11 No. 1(2013): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.285>.

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Adapun alasan-alasan pokok bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu yang tercantum dalam UUP pasal 4 ayat (2) dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>11</sup>

Kasus-kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tulang Bawang terdapat berbagai macam alasan yang mendorong seorang suami mengajukan permohonan izin poligami, ada yang beralasan karena seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, atau seorang istri mempunyai penyakit cacat badan sehingga istri tidak dapat melahirkan keturunan yang mana alasan tersebut tentu dikabulkan oleh Pengadilan karena sudah sesuai dengan pokok alasan diperbolehkannya poligami yaitu UUP Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal ini penulis menemukan kasus perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2019, dalam permasalahan tersebut pemohon mengajukan izin poligami yang alasannya tidak berdasarkan alasan-alasan diperbolehkannya poligami oleh Undang-undang seperti perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb yaitu suami ingin mempunyai anak laki-laki dari calon istri kedua.

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2).

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nusa Aulia,2012),2.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb ialah mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar termohon (istri pemohon) memberikan izin kepada pemohon mengajukan permohonan poligami dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Mengenai hal tersebut sangat berlawanan dengan syarat utama dari poligami yaitu pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian**

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada penelitian ini dibatasi kepada pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki?



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim Pengadilan Agama pada perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki yang diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat Tulang Bawang tentang izin poligami di Pengadilan Agama.

- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang poligami di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muzhakir Kurnia Sinandaka (2019) yang berjudul “Analisis Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara poligami yang diajukan oleh pemohon dengan menggunakan pertimbangan yang dilihat dari sisi ekonomi pemohon, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum dan Prinsip Keadilan. Adapun faktor-faktor yang membuat hakim menolak permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon dikarenakan faktor ekonomi atau penghasilan dari pemohon tidaklah cukup untuk membiayai kedua istri dan anak-anaknya apabila dikabulkan.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nopan Oputu (2016) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt)”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa

---

<sup>12</sup>Muzhakir Kurnia Sinandaka, “Analisis Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2019), 9.

pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti halnya di Pengadilan Agama Limboto seseorang ingin berpoligami, harus memiliki izin dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sinta Wahyuni (2019) yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual berdasarkan pada dalil Al-Quran surat An-Nisa’ Ayat 3. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Putri Haryani (2019) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan No. 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hasil pertimbangan hakim melihat dari persyaratan UUP, di mana persyaratan itu sudah terpenuhi dan hakim juga melihat dari kedekatan

---

<sup>13</sup>Nopan Oputu, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor.143/Pdt.G/2013/PA.Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt)” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2016), 6.

<sup>14</sup>Sinta Wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 4.



Pemohon yang sudah terlalu dekat dengan calon istri kedua dikhawatirkan adanya kemudharat antara keduanya.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Wadudatut Thoyyibah (2020) yang berjudul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”. Disebutkan bahwa pemberian izin poligami didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim yakni hakim menerapkan Pasal 4 dan 5, hakim menerapkan asas *Contra Legem*, hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya dan alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni istri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>16</sup>

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki karena pada istri pertama ia tidak mendapatkan anak laki-laki dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama jika suami tidak melakukan poligami. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

---

<sup>15</sup>Putri Handayani, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.)” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 9.

<sup>16</sup>Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Indonesia Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 11.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) di mana bahan-bahan atau obyek yang akan diteliti dengan menelaah dan menggunakan bahan tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penjelajahan umum, menyeluruh, memotret semua objek dan melakukan deskriptif terhadap semua data yang direkam.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup>Husaini Usman dkk, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41.

materi penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya bersumber dari:

- 1) Putusan perkara No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Pasal 57 kompilasi hukum Islam tentang alasan-alasan diperbolehkannya poligami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber informasi yang akan menjadi bahan penunjang penulis untuk melengkapi dalam melakukan analisa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan izin poligami.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.



### 3. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan yang dilakukan penulis. Mengenai pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Kepustakaan

Kepustakaan adalah data yang diambil dari buku, jurnal skripsi, dan data yang berkaitan dengan penelitian. Kepustakaan tersebut didasarkan pada teori-teori yang jelas. Studi pertamanya adalah mencari dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang.

### 4. Pengolahan data

#### a. *Editing*

*Editing* adalah data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Penandaan

Penandaan adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan, simbol atau kata tertentu menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna.

### c. Sistematis

Sistematis adalah melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahas.

## 5. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan inti di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana pada akhirnya akan tercapai sebuah hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, data tidak berbentuk angka meskipun ada kemungkinan yang berbentuk angka hal tersebut akan disebutkan dalam bentuk verbal. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode pendekatan berfikir induktif yakni merupakan analisa dengan berangkat dari faktor yang khusus ditarik kesimpulan umum..

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pengertian poligami, kebolehan berpoligami menurut beberapa ulama dan undang-undang, alasan-alasan diperbolehkannya melakukan poligami

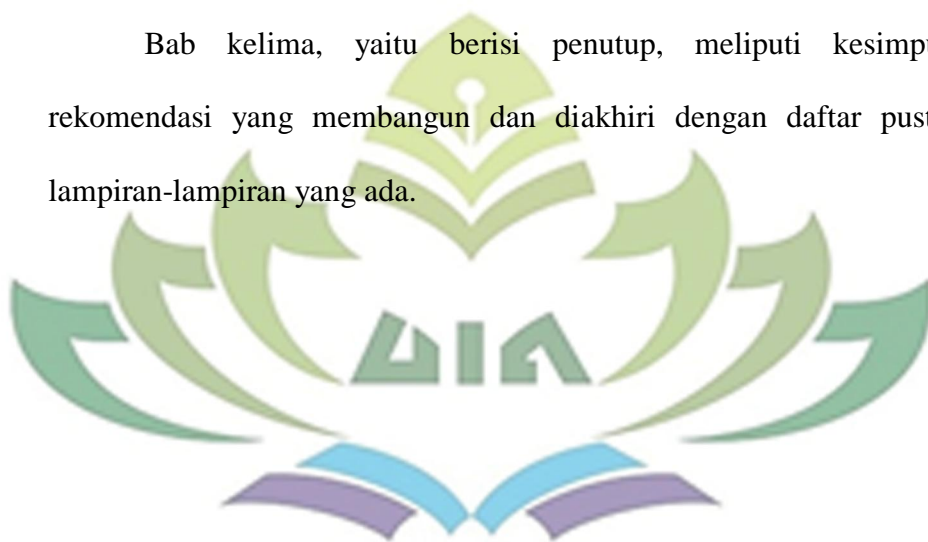
menurut UU dan KHI, kemudian fokus penelitian, yaitu pada putusan Hakim Pengadilan Agama No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, hikmah poligami, alasan kebolehan poligami, syarat poligami, prosedur poligami, serta pandangan ulama terhadap poligami dan kedudukan anak laki-laki dalam Islam dan dalam adat Lampung.

Bab ketiga, menjelaskan tentang duduk perkara putusan No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb, pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara dan amar putusan. Hal di atas dipaparkan agar nantinya menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap data yang didapat.. Analisis putusan Hakim pada perkara 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa *yunani*, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>18</sup>

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.<sup>19</sup>

Istilah poligami jarang dipakai dikalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari

---

<sup>18</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 231.

<sup>19</sup> Ibid.

poliandri. Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, di mana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan.<sup>20</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>21</sup>

Secara terminologi, poligami artinya banyak istri. Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Istilah poligami digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KUHP, sebagaimana terdapat pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Menurut UUP sebagaimana terdapat pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan, seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa lain, poligami artinya suami yang beristri lebih dari satu; *mamadu*, *nyandung* atau *ngawayuh* (bahasa sunda). Poligami telah dilakukan sejak zaman para Kaisar Romawi, bahkan di antara mereka ada yang menikahi lebih dari 50 wanita. Demikian juga, dikalangan bangsa Arab sebelum Islam datang, kaum laki-laki dapat sepuasnya menikahi perempuan sebanyak mungkin. Konon,

---

<sup>20</sup> Ibid., 232.

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

bahwa sahabat Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam beristrikan 40 orang. Setelah Islam datangpun, poligami masih dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau beristri sembilan orang. Penegak ajaran tauhid yang pertama dan utama, yakni Ibrahim pun beristri dua, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan demikian, secara historis, poligami tidak mungkin dimungkiri, secara sosiologis tidak mungkin dihindari, dan secara yuridis telah terlindungi. Dalam hal ini, Murthada Murthahari mengatakan, “poligami secara praktis akan terus hidup di kalangan bangsa yang dewasa dan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab”.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT yaitu:

### a. Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milik. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS Al-Nisa' [4]:3).*

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebi, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 36.

Ayat tersebut, menurut Khozin Nasuha, “memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika semuanya dihantui oleh rasa takut atau khawatir tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya”.<sup>23</sup>

Para mufasir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Ridha menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi asbab nuzul ayat ini diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan Baihaqi dari Urwah Ibn Zubair: “dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar”. Riwayat lain juga dari Aisyah ra: “beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, berkeinginan mengawini anak yatim yang berada

---

<sup>23</sup> Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 233.



dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya”.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, “poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri di bidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri”.<sup>25</sup>

Menurut Quraish Shihab yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu ayat tiga menegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita lain selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu,

---

<sup>24</sup>Al-Thabarsyi, Majmua A;-Bayan, *Fi Tafsir Al-Quran, Jilid III Dar Al-Ihya Turas Al-Arabi* (Beirut: 1986), 11.

<sup>25</sup> Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 74.

yaitu menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yaitu lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya mereka.<sup>26</sup>

Quraish Shihab juga mengaris bawahi, ayat ketiga ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>27</sup>

b. Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara (dari kecurangan), maka*

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 337.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), 265.

*“sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (Q.S Al-Nisa’[4]: 129).

Penafsiran ayat di atas, Abdullah Ibn Abbas menjelaskan adil yang dimaksud adalah adil dalam *hub* (cinta) dan *jima* (hubungan intim pada suami-istri).<sup>28</sup> Menurut pandangan Ibn Abbas Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturukkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.<sup>29</sup>

Selanjutnya menurut Quraish Shihab kandungan ayat 129 adalah sebagai berikut, “Kamu wahai suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal material dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang di perintah Allah dan bertakwa, yakni menghindari kecurangan maka Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil

---

<sup>28</sup> Abdurahman Wahid, *Dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 150.

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 515.

yang kamu lakukan sesungguhnya Allah selalu Maha Pegampun lagi Maha Penyayang".<sup>30</sup>

Selanjutnya Mustafa Al-Sibai mengatakan bahwa "keadilan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri".<sup>31</sup>

Dua surat yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak ukurnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum poligami itu boleh dan seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja dengan syarat dapat berlaku adil. Namun, bila ternyata tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai istri, hendaknya ia mengawini seorang istri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>32</sup>

Dasar hukum poligami yang kedua adalah Al-Hadis:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:  
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا،

---

<sup>30</sup> Ibid., 600.

<sup>31</sup> Nuraddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonseisa*, 177.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 87.



ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَآءُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مُكَاتِرُ

بِكُمْ الْأُمَمَ

*“Dari Ma’qil bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahnya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Jangan! Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata: “Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap ummat-ummat lainnya”. [HR Abu Dawud no.2050].*

Tentang hadis di atas, Syaikh Musthafa al’ Adawi menjelaskan:

“Menikah banyak dengan izin Allah dapat memperbanyak kelahiran. Dan banyaknya kelahiran, dapat menyebabkan takatsur (bangga dengan banyaknya jumlah)”. Dengan demikian, wanita yang subur juga dinasehati bila mengetahui seorang laki-laki (yang melamarnya) itu mandul, maka jangan menikah dengannya. Kemudian larangan (dalam hadist) ini bersifat makruh, bukan pengharaman. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempertahankan para istrinya yang tidak melahirkan anak kecuali Khadijah dan Mariyah. Demikian, bahwa salah satu cara memperbanyak keturunan adalah dengan memperbanyak istri.<sup>33</sup>

UUP menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan

<sup>33</sup> <https://almanhaj.or.id/2551>, “Kebolehan Poligami dalam Islam”.

mengizinkannya, suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UUP dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>34</sup>

### **3. Hikmah Poligami**

Karena tuntutan pembangunan, Undang-Undang diperbolehkannya poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memerhatikan masalah ini. Di antara hikmah-hikmahnya adalah:<sup>35</sup>

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul

---

<sup>34</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 298.

<sup>35</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 370.

tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar yang menganiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan poligami.

- c. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.

Adakalanya, dalam suatu negara, jumlah kaum wanitanya lebih banyak daripada jumlah kaum pria. Oleh karena itu, ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis dan menyia-nyiakan kekayaan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada.

Beberapa negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki terpaksa membolehkan poligami, karena tidak melihat jalan pemecahan yang lebih baik daripada itu sekalipun menyalahi agama tradisi dan perilakunya.

Kesanggupan laki-laki untuk berketentuan lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak masa baliq. Sedang perempuan dalam masa haid tidak memilikinya, masa haid ini datangnya setiap bulan yang temponya kadang sepuluh hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur empat puluh lima sampai lima puluh tahun. Sedangkan pihak laki-laki masih tetap subur sampai dengan umur lebih dari enam puluh tahun.

- d. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengeluarkan seorang istri yang bisa mengurus rumah tangganya, Bagaimana akan mendapat anak, jika istrinya mandul. Dan bagaimana seorang yang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh.

Kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemandulan dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpahkan



semuanya kepada suami? Atau, apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau, dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada di sampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.

Ternyata, pemecahan yang terakhirlah yang paling baik lagi bijaksana dan lebih dapat diterima. Orang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat pasti mau menerima pemecahan yang terakhir ini

- e. Segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

#### **4. Alasan Kebolehan Poligami**

Prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomi oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUP:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>36</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tanggayang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembunyikan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa anak, tidaklah lengkap, atau kurang sempurna.

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 140.

Namun tidak sedikit, pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena mungkin juga disebabkan faktor tertentu yang menyertainya.

## 5. Syarat Poligami

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UUP dijelaskan:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>37</sup>
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Syarat poligami dalam hukum Islam menurut Sayuti Thalib, adalah:

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil.

---

<sup>37</sup>Ibid., 141.

- b. Bila suami sanggup adil kepada istri-istrinya.
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang istri.
- d. Ada kemampuan secara materi.
- e. Bila istrinya tidak berfungsi sebagai istri.<sup>38</sup>

Syarat poligami menurut Kompilasi Hukum Islam:

- a. Beristri lebih dari orang tidak boleh pada waktu bersamaan, kalau terjadi seperti itu maka batal demi hukum.
- b. Harus berlaku adil kepada istrinya dan anak-anaknya.
- c. Istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- d. Istri mendapatkan cacat badan dan tidak dapat disembuhkan.
- e. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami.

## **6. Prosedur Poligami**

Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam.<sup>39</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka

---

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), 58.

<sup>39</sup>Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics*, Vol.2 No.2 (2005): 11, <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 56 KHI menyebutkan:<sup>40</sup>

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>41</sup>

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>42</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- Pasal 41 huruf(a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI diatas.

---

<sup>40</sup>Ibid., 142.

<sup>41</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>42</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.



- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

Ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, UUP Pasal 5 Ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan [Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974].

Berdasarkan hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud Pasal 43 (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana . Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975, Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:<sup>44</sup>

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Ayat (3), Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 Ayat (1), 11,12,44, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

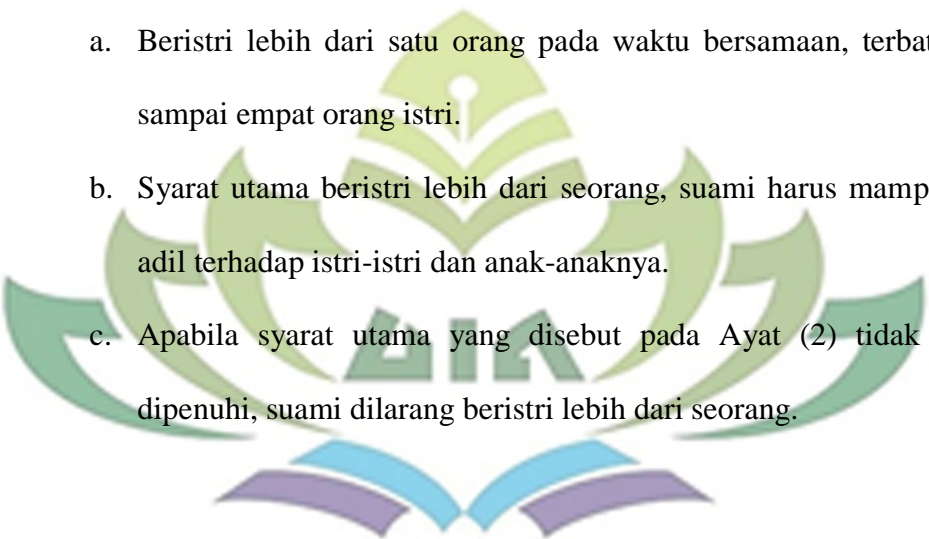
Menurut prespektif metodologis, peraturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri

---

<sup>44</sup> Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah Swt, berdasarkan cinta dan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*).

Kendatipun demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- 
- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
  - b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
  - c. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

## **B. Pandangan Ulama Terhadap Poligami**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dan istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan istrinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.<sup>45</sup>

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami yang hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, sedangkan manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing istrinya.

Mantan Syekh Al-Azhar ini menjelaskan tiga alasan haramnya poligami. *Pertama*, syarat poligami adalah berbuat adil, syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS.

---

<sup>45</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 12.



An-Nisa (4) ayat 129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. *Kedua*, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. *Ketiga*, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.<sup>46</sup>

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalib*” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Alasan yang membolehkan Al-Maraghi, yaitu:<sup>47</sup>

1. Karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
3. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.

---

<sup>46</sup> Ibid., 147.

<sup>47</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 176.

4. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.

Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli fikih kontemporer, seperti halnya Murthada Muthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qaradhawi, dan Wahbah al-Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen kebolehan berpoligami. Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib dan sunnah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Selain itu, kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacur.<sup>48</sup>

Sementara Al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Yang membedakannya, ia tak sepakat ketika syarat yang telah diterapkan oleh syariat ini justru ditetapkan pula oleh negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seorang untuk menikah. Selain itu, lanjutnya, poligami sangat jarang dilakukan dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 216.

<sup>49</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 216.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama konvensional mengakui poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi perintah (wajib) seperti diasumsikan kebanyakan orang. Demikian juga penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebutkan poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian orang.

### C. Kedudukan Anak Laki-Laki

#### 1. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Islam

Nasab secara etimologi (bahasa) adalah keturunan atau kerabat. Mahmud Yunus dalam buku kamusnya mengartikan kata nasab sebagai definisi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Kebanyakan ahli bahasa menyebutkan bahwa nasab hanya untuk mengkaji keturunan kepada jalur ayah. Namun demikian, beberapa pendapat menyebutkan bahwa nasab juga diambil dari keturunan ayah dan ibu. Kata nasab ini ternyata tidak banyak didefinisikan oleh *fuqoha*. Kebanyakan *fuqoha* hanya pada definisi secara bahasa. Namun beberapa orang seperti Andi Syamsu Alam mendefinisikan secara terminologis (istilah), nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu,

nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>50</sup>

Adapun kedudukan anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat.

Sebagaimana dalam QS.An-Nisa ayat 34 Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukulilah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S.An-Nisa:34).*

Kedudukan laki-laki dalam Islam adalah sebagai "pemimpin", Namun, anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Al-Quran adalah sama. Bahkan semua laki-laki dan perempuan ditingkat manapun tidak berbeda. Menurut Umar, ada beberapa variabel yang dapat

---

<sup>50</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta, 2013), 22.

digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel tersebut adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah.
- b) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah (penguasa) di bumi.
- c) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Tuhannya.
- d) Adam (sebagai symbol laki-laki) dan Hawa (sebagai symbol perempuan) terlibat secara aktif dalam dramatis kosmis.
- e) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.<sup>51</sup>

Namun, laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dalam Islam. Hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu”.* (Q.S. Al-Hujurat:13).

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas social (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan

<sup>51</sup> Evi Fatimatur Rusydiyah, “Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4 No.4 (2016): 32.



bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya, persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT, ayat ini juga memepertegas misi pokok al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-Quran mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut diabaikan.

Berdasarkan hukum kewarisan Islam, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* yang tidak ditetapkan berupa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa bagian setelah diambil bagian oleh ahli waris *dzawil firudl* yang termasuk ahli waris mutlak.<sup>52</sup>

Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami dan anak laki-laki. Maka bagian ayah = seperenam, ibu = seperenam, suami = seperempat dan anak laki-laki menerima sisanya bagian. Berarti anak laki-laki merupakan ahli waris *ashabah* yang terkuat, sehingga anak laki-laki dapat menutup atau mahjub selain ahli waris mutlak, kecuali kakek dan nenek.

---

<sup>52</sup> Firdaweri, *fiqh mawaris* (IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 206.

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bagian harta warisan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.

## 2. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Adat Lampung

Masyarakat Lampung menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal, memiliki konsep dasar pewarisan berupa penerusan harta waris kepada anak laki-laki tertua. Sebuah keadaan khusus, dimana dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dimungkinkan melakukan pengangkatan anak secara adat dan melakukan sebuah perkawinan adat semanda (*ngakuk ragah*) yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga Lampung sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Lampung baik dalam hal pembagian warisan, kepemimpinan keluarga, dan pengayoman keluarga besar.<sup>53</sup>

Adapun menurut hukum adat Lampung laki-laki adalah sebagai penerus keturunan yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, anak laki-laki dituntut untuk bisa mengatur keluarga besar dan para kerabatnya. Dikarenakan masyarakat Lampung mayoritas agama Islam jadi laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi marga adatnya. Dalam hukum adat Lampung saibatin termasuk kedalam hukum adat yang tidak tertulis. Seperti yang disebutkan oleh Soekanto, Soepomo menyatakan bahwa adat adalah “hukum yang tidak tertulis

---

<sup>53</sup> Wita Herlina, dkk, “Analisis Kedudukan Anak Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin,” *Jurnal Fkip Unila*, Vol. 4 No. 4 (2016), 9.

dalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law), meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak diktakkan oleh yang berwajib, tetapi harus dihormati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.

Anak laki-laki dalam adat Lampung disebut *Pesesekeh Nyawa* ialah anak laki-laki itu adalah segalanya di dalam keluarga, sangat berperan penting atau sangat berharga. Bila seseorang tidak mempunyai anak laki-laki maka kurang sempurna hidup dan kurang tenang dalam menghabiskan masa tuanya. Jadi artinya anak laki-laki itu sangat diutamakan di dalam adat lampung karena anak laki-laki itu akan menjadi penyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara atau melaksanakan hukum adat.

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal Alternated. Pembagian harta warisan adat lampung dapat dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia atau pun pewaris sudah meninggal dunia hanya saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum adat lampung hanyalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki

pengganti ayah karena anak laki-laki berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Yenni Oktavia, "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektid Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 73.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Hadis Riwayat Abu Dawud

Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-1 Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

### B. Buku/Literatur

Abdurrahman Wahid, *Dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1998.

Ahmad Fathoni Ramli, *Adiministrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: 1969), Jilid IV.

Al-Thabarsyi, Majmua A' Bayan, *Fi Tafsir Al-Quran, Jilid III Dar Al-Ihya Turas Al-Arabi*, Beirut, 1986.

Beni Ahmad Saebi, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003.

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.



Firdaweri, *fiqh mawaris*, IAIN Raden Intan Lampung, 2018.

H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Husaini Usman dkk, *Metodelogi Penelitian Social*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Komplilasi Hukum Islam, Bandung: Nusa Aulia, 2012.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2008.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

Muzhakir Kurnia Sinandaka, “Analisis Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurab*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992.

Nopan Oputu, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor.143/Pdt.G/2013/PA.Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt)”, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Nuraddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, 2013.

Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Putri Handayani, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.)”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2019.

Putusan Nomor.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Sinta Wahyuni, “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Indonesia Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Yenni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi, IAIN Metro, 2020.

### C. Jurnal

Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 No.2 (2018): 4, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.v5i2.7108>.

Evi Fatimatur Rusydiyah, "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4 No.4 (2016).

Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics*, Vol.2 No.2 (2005): 11, <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

Rudi Nurudin Ambary, "Perkawinan Poligami yang Berkeadilan," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1(2013): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.285>.

Wita Herlina, dkk, "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin," *Jurnal Fkip Unila*, Vol.4 No.4 (2016).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dan (2)

#### **E. Sumber Online**

<https://almanhaj.or.id/2551>, "Kebolehan Poligami dalam Islam".

<https://id.m.wikipedia.org>.